

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN INDUSTRI TENAYAN KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Pekanbaru



EVI NISPA KRISTINA HONDRO
157310414

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pengasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau S1 pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Puji Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu besar untuk kehidupan penulis dan para Keluarga dan para Sahabat juga.

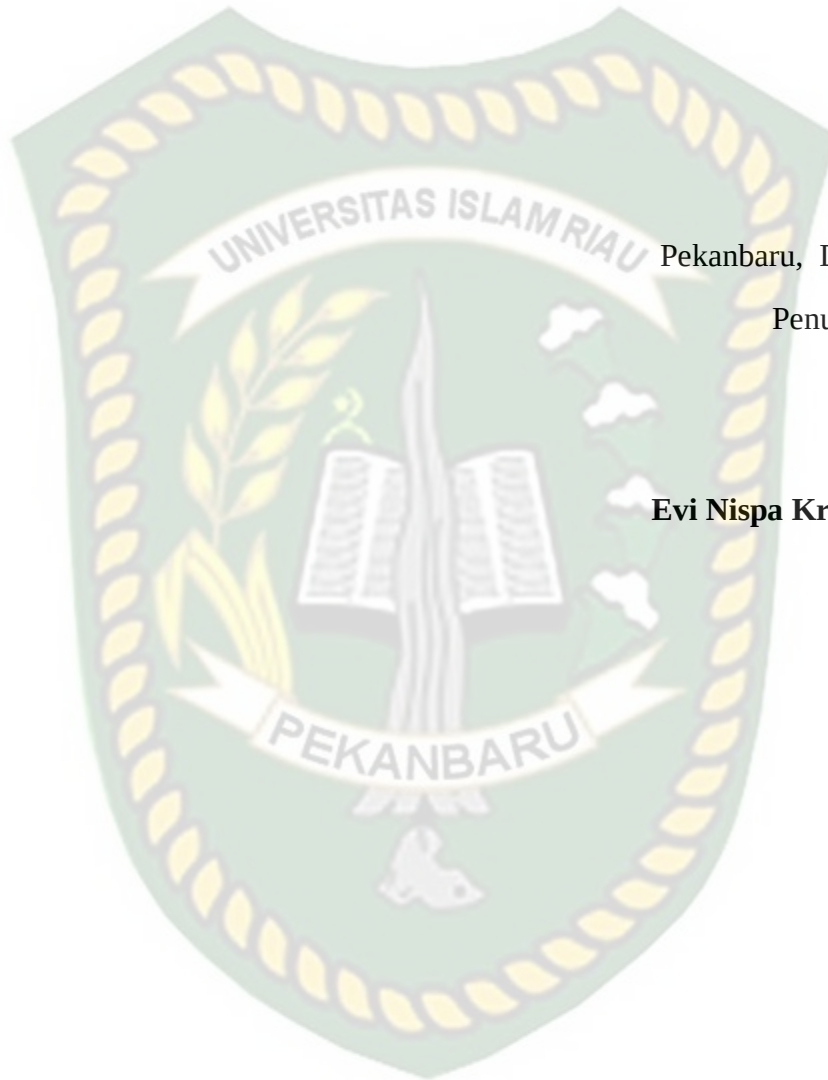
Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam Skripsi yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini
2. Bapak Budi Mulianto, S.IP,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sekaligus sebagai PA dari pada Penulis
3. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si, selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, masukan yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengajar dan memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat sekali bagi/ buat penulis
6. Bapak- Bapak dan Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
7. Bapak/Ibu pegawai Camat Kecamatan Tenayan Raya dan Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang telah membantu dan bersedia memberikan data-data yang diperlukan penulis guna penyelesaian skripsi

8. Ayahanda Ferdianus Hondro dan Ibunda Rusince br.Bancin tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi, yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah bapak dan mamak berikan, tak akan aku kurang bakti dan cinta kasih sayangku padamu, dan hanya Bapa di Sorga yang mampu membalas kebaikan-kebaikan bapak mamak yang begitu besar di kehidupanku. Begitu juga dengan adek-adek ku Satris Renaldi Hondro dan Arko Joshua Hondro, semoga bisa menyusul dan kita menjadi yang terbaik yang bisa membanggakan bapak dan mamak
9. Terimakasih juga buat Rocky Jonson Tobing yang telah memberikan semangat, support dan sebagai motivator peyemangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, terimakasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kalian menjadi suatu kenangan terindah yang kudapat semenjak menimbang ilmu di universitas ini

Akhirnya kepada Tuhan yang Maha Esa penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan berkat pengasihannya yang diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang layak dari Tuhan Yesus Kristus, Amin



Pekanbaru, Desember 2019

Penulis Ttd,

Evi Nispa Kristina Hondro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fenomena	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	19
B. Kerangka Pikir.....	41
C. Konsep Operasional.....	42
D. Operasional Variabel.....	45

E.	Teknik Pengukuran.....	46
----	------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Tipe Penelitian.....	49
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Populasi dan Sampel.....	50
D.	Teknik Penarikan Sampel.....	51
E.	Jenis dan Sumber Data.....	52
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
G.	Teknik Analisis Data.....	55
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	55

BAB IV DESKRIPSI DAN LOKASI PENELITIAN

A.	Keadaan Geografis.....	57
B.	Pemerintahan.....	57
C.	Penduduk.....	58
D.	Sosial.....	58
E.	Sejarah Lokasi Penelitian.....	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Indentitas Responden.....	61
B.	Hasil Penelitian.....	65
C.	Hambatan Penelitian.....	79

BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
--------------------------------	-----------

DOKUMEN LAIN.....	88
--------------------------	-----------

LAMPIRAN SALINAN PENDUKUNG.....	89
--	-----------

Lampiran I Daftar Kusioner.....	90
--	-----------

Lampiran II Daftar Wawancara.....	97
--	-----------

Lampiran III Dokumentasi Penelitian.....	98
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	12
I.2 Data Masyarakat Yang Bertani Ubi Kayu Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	14
II. 1 Operasionalisasi Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	45
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	50
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru..	56
V.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan TenayanRaya Kota Pekanbaru.....	62

V.2	Distribusi Tingkat Umur Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan TenayanRaya Kota Pekanbaru....	63
V.3	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan TenayanRaya Kota Pekanbaru.....	64
V.4	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	67
V.5	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	70
V.6	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	73
V.7	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	76

V.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	78
-----	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. 1 Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	41

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DIKELURAHAN INDUSTRI TENAYAN KECAMATAN
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

EVI NISPA KRISTINA

157310414

ABSTRAK

Kata kunci : Tugas, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan hasil pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dengan rumusan masalah bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dimana masih terdapat kurang aktifnya camat dalam menjalankan tugas nya dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan yaitu termasuk kedalam tipe survey deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dimana populasinya adalah PPL, Camat, Lurah, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan seperti pengurus LPMK, ketua kelompok tani, RT dan RW, dengan total jumlah responden sebanyak 24 Orang yang penarikan sampel nya menggunakan purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang teknik pengumpulannya dengan kusioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru disimpulkan ke dalam kategori Cukup Baik dengan persentase 62%. Diharapkan bagi Camat Kecamatan Tenayan Raya kedepannya lagi dapat lebih aktif dalam melakukan koordinasi baik dengan perangkatnya, Lurah dan PPL, yang berperan untuk menambah wawasan bagi para kelompok tani, dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan informal yang tentunya dapat dihadiri oleh Camat, jangan hanya kegiatan nya saja yang berjalan tetapi Camat juga harus lebih giat berperan di dalam forum tersebut, yang gunanya untuk dapat lebih lagi meningkatkan dan dapat memajukan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan sehingga Kelurahan tersebut dapat lebih maju dan maju lagi di setiap bidang pemberdayaannya.

**AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAMAT TASK IN
COORDINATING COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN THE
TENAYAN INDUSTRIAL VILLAGE THE TENAYAN RAYA PEKANBARU
CITY**

EVI NISPA KRISTINA

157310414

ABSTRACT

Keyword: Analisis, Coordinating, Community Empowerment

This study aims to determine the results of the task of the subdistrict head in the Tenayan Industrial Village, Tenayan Raya District Pekanbaru City and barriers resulting from the implementation of the Camat task in coordinating community empowerment activities in the Tenayan Industrial Village the Tenayan Raya District Pekanbaru City. With the formulations of the problem of how the implementation of the task of the subdistrict head in coordinating community empowerment activities in the Industrial District of Tenayan sub-district of Tenayan Raya, Pekanbaru City. Where there is still a lack of active Camat in carrying out their duties and coordinating community empowerment activities. The type of research used is included in the descriptive survey type using quantitative methods where the population is PPL, Camat, Lurah and Member of Social institutions such as LPMK Administrators such as LPMK Administrator, heads of farmer groups, RT dan RW, with a total number of respondents of 24 people, whose sampling. The types and sources of data used are primary and secondary data with questionnaire, interview, observation and documentation techniques. Based on the results of the analysis of the implementation of the task of the sub-district head in coordinating community empowerment activities in the Tenayan Industrial Kelurahan the Tenayan Raya District of Pekanbaru the City was concluded to be in a fairly good category with a percentage of 62%. It is hoped that the Sub-District Head of Tenayan Raya will be more active in the future in coordinating both with the apparatus, the Lurah and PPL, whose role is to broaden the horizons for the farmer groups, by increasing the number of informal meetings which the Camat can of course attend, not just the activities. which runs but the Sub-District Head must also be more active in the forum, which is used to be able to further improve and be able to advance Community Empowerment activities in the Tenayan Industrial Village so that the Village can be more advanced and advanced in each area of empowerment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara yang sudah berdiri dan merdeka dengan syarat dan ketentuan tertentu pasti mempunyai tujuan-tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Begitu juga dengan Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam UUD 1945 pada alinea ke-4.

Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dengan cara sentralisasi, melimpahkan sebagian urusan Pemerintah tersebut kepada perangkat Pemerintah/Wakil Pemerintah di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi, dan juga dapat menugaskan Pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi serta menggunakan azas persatuan. Perlunya

pelimpahan urusan pada Pemerintah Daerah, karena dilihat dari aspek luasnya wilayah dan majemuk sistem sosial Indonesia. Luasnya wilayah tidak memungkinkan Pemerintah Pusat dapat memberi pelayanan pada Rakyat-rakyat Desa, sementara majemuknya sistem sosial sudah dipastikan tidak akan mampu diselesaikan oleh sistem Pemerintahan yang sentralistis.

Karena itu pendiri Negara melalui pikiran-pikiran yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang membagi Indonesia dalam satuan-satuan daerah yaitu daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota. Kemudian berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan pengertian Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah bahwa pengertian Pemerintahan Daerah yakni “kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi suatu kewenangan Daerah Otonom”. Sedangkan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara Demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu wakil Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, kewajiban, larangan, dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dibiayain oleh APBN.

Kemudian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya lebih menitikberatkan kewenangan pada daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan Masyarakat, sehingga dengan demikian Daerah Kabupaten/Kotapulah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari Masyarakat.

Untuk menjalankan urusan-urusan tersebut maka di Daerah di bentuk perangkat Pemerintah Daerah untuk Daerah Kabupaten atau Kota yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan;

Kemudian kebanyakan tugas Camat berdasarkan pada PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam pasal 10 dijelaskan Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di Kecamatan;
 - 2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati/Wali Kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai denganketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari beberapa tugas Camat tersebut peneliti memfokuskan pada tugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kecamatan yang mencakup beberapa Kelurahan di masing-masing wilayah sangat penting untuk diberdayakan sehingga dapat menunjang kemajuan

daerah dan mensejahterakan Masyarakatnya. Wilayah Kelurahan merupakan unit terkecil di dalam Wilayah Pemerintahan, akan tetapi memegang peranan penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk mencapai kemajuan Bangsa dan Negara. Keadaan Kelurahan dewasa ini telah lebih maju dibandingkan masa sebelumnya yang telah berkembang pesat, antara lain perkembangan bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan pun semakin berkembang luas dan kompleks seperti bidang keamanan/ketertiban, pertanian, peternakan, perindustrian, dan keagamaan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini, dikarenakan Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Konsep pemberdayaan masyarakat pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan Aparat Pemerintah setempat. Hal ini sangat penting mengingat Kelurahan merupakan unit Pemerintahan yang terkecil dalam tata Pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan Masyarakat. Dengan demikian diharapkan bahwa Aparat Pemerintahan khususnya pada tingkat Kecamatan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada Masyarakat dengan salah satunya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyederaskan, menyeimbangkan kegiatan-kegiatan

yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Ndraha, 2008 ;2009)

Koordinasi sebagai proses dimana pimpinan dalam hal ini Camat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya termasuk kepada para Lurah yang ada di Kecamatan Tenayan Raya beserta pegawai dan Masyarakat serta kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Koordinasi harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian usaha efektif. Maka dari itu koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap para Lurah, Dinas terkait, dan Organisasi yang berperan di dalam program koordinasi kegiatan tersebut harulah dapat konsisten untuk diikuti dan dijalankan dan dapat berperan aktif sesuai tugas nya masing-masing. Dimana koordinasi antara Camat beserta Lurah ialah koordiansi secara vertikal dikarenakan Kelurahan merupakan perangkat di bawah Camat, beda hal nya dengan Camat ke pada Desa yang secara Horizontal karena mereka memiliki unit yang levelnya setingkat walaupun Kelurahan sama kedudukan sebagai unit perangkat daerah yang terkeci beserta Desa.

Pemberdayaan adalah suatu program yang direncanakan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian suatu kelompok Masyarakat, sedangkan proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat secara

keseluruhan. Namun pemberdayaan Masyarakat tidak terlepas dari proses pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan daerah, karena proses pembangunan yang berkelanjutan akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Masyarakat untuk berkembang dalam berbagai hal baik dari segi sosial, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.

Kegagalan pendekatan pembangunan yang berporos pada pertumbuhan ekonomi yang berwajah sentralistis dan bersifat top-down telah menumbuhkan kesadaran sekaligus tekad para pegiat pembangunan di Indonesia untuk memasukkan dimensi pemberdayaan ke dalam strategi pembangunan nasional. Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan, yang tadinya tidak dilibatkan dan bahkan diasingkan dalam proses pembangunan, kini dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidupnya. Mereka tidak lagi dianggap hanya sebagai penerima pasif dari berbagai ragam kegiatan pembangunan. Mereka diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam mengorganisir dan mengambil keputusan, merespon berbagai permasalahan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang bermatra pemberdayaan seperti partisipatoris, emansipatoris, inisiatif local, kearifan local, berbasis Masyarakat ‘berpusat pada Rakyat’ kini semakin dipandang sebagai keniscayaan strategis pembangunan Nasional. (Suharto, 2008:41)

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas pula dari pengaruh berbagai faktor, dimana salah satu diantaranya yang tidak boleh diabaikan adalah

pembentukan kesamaan visi antar Pemerintah dan Masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan Masyarakat adalah tercapainya kemandirian Masyarakat dengan segala potensi, melalui partisipasi dan swadaya Masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Namun demikian, keberhasilan program kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di daerah sulit diwujudkan tanpa adanya upaya koordinasi dari pihak Pemerintah. Oleh karena itu pihak Pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai satuan kerja, baik yang merupakan unsur-unsur interen dari pada organisasi Pemerintah maupun dari unsur swasta atau Masyarakat.

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan ini membentang sepanjang jalan Lintas Timur sampai Desa Lumbu Ujung (Teleju). Terdiri atas 129 RW dan 462 RT, luas Wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km² dengan jumlah Penduduk 163.610 Jiwa.

Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bambu Kuning
2. Kelurahan Bencahlesung(Sail)
3. Kelurahan Industri Tenayan
4. Kelurahan Kulim
5. Kelurahan Melebung
6. Kelurahan Mentangor
7. Kelurahan Pembatuan
8. Kelurahan Pematang Kapau
9. Kelurahan Rejosari

10. Kelurahan Sialangrampai
11. Kelurahan Sialangsakti
12. Kelurahan Tangkerang Timur
13. Kelurahan Tuahnegeri

Banyaknya jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya mendorong Camat agar dapat lebih baik dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang sesuai dengan tugas seorang Camat di mana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 1 tentang Kecamatan bahwasanya Camat memiliki tugas yang salah satu nya memberdayakan Masyarakatnya sehingga Camat memiliki peran besar untuk mewujudkan sebagian dari tugas nya tersebut, yaitu bersama-sama dengan setiap Lurah maupun organisasi yang terkait untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat kepada Masyarakat yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Dimana seperti yang tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 pasal 25 ayat 3 tentang Kecamatan Lurah juga memiliki tugas untuk memberdayakan Masyarakat di Kelurahan. Sehingga koordinasi dari Kecamatan kepada setiap Kelurahan harus dapat berjalan dengan baik dimana Camat dan Lurah memiliki tugas yang sama dalam memberdayakan Masyarakat. Sehingga penulis memfokuskan penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu Kelurahan Industri Tenayan. Adapun alasan dari penulis memilih Kelurahan Tenayan Raya dikarenakan potensi wilayah nya dalam pertanian ubi kayu.

Kelurahan Industri Tenayan merupakan salah satu dari 13 Kelurahan yang ada pada Kecamatan Tenayan Raya yang pada tahun 2017 mengalami pemekaran daerah, dimana Kelurahan Industri Tenayan dimekarkan dari Kelurahan Sail. Kelurahan Industri Tenayan memiliki 2 RW dan 9 RT, dengan jumlah Penduduk 2.553 jiwa. Kelurahan Industri Tenayan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki kemajuan yang pesat atau baik pada setiap tahun nya. Keberhasilan atau kemajuan suatu Daerah khusus nya pada Daerah Kelurahan pastinya di dorong dengan besarnya campur tangan dari pihak Pemerintah daerah yaitu Kecamatan dimana seperti yang diketahui bahwa Kelurahan ialah perangkat dari Kecamatan sehingga peran Camat sangat besar untuk memajukan daerah Kelurahan yang ada dibawah naungan nya. Namun fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya kinerja dari Camat masih kurang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah dicantumkan dalam peraturan.

Selanjutnya adapun kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang penulis fokuskan pada Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya yaitu Kelurahan industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Table I.1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Jenis Pemberdayaan	Kegiatan
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	• Menerapkan 1x dalam sebulan kegiatan gotong royong di masing-masing RT dan RW • Mengaktifkan kegiatan siskamling di masing-masing RW
2	Pemberdayaan Ekonomi	• Membentuk beberapa kelompok pertanian • Membentuk beberapa kelompok peternakan
3	Perberdayaan Infrastruktur	• Mengintrusikan kepada RT dan RW untuk melakukan kegiatan inventarisasi usulan dibidang infrastruktur yang nantinya akan di bawa pada forum musrembang hingga tingkat Kota

Sumber :Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru,2017

Dari uraian diatas dapat gambaran bahwa partisipasi Masyarakat sangat berperan dalam proses berjalannya pemberdayaan itu sendiri bagi Masyarakat,dimana tidak hanya mengandalkan program dari Pemerintah Kelurahan saja, tetapi peran Masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk dapat memberdayakan diri nya sendiri. Dari tabel pemberdayaan diatas penulis mengambil objek yang akan didalami penelitian nya terhadap pemberdayaan ekonomi, dimana perberdayaan ekonomi ialah membentuk beberapa kelompok pertanian.Adapun bentuk pertanian yang

diselenggarakan oleh Camat Kecamatan Tenayan Raya beserta Lurah Industri Tenayan ialah program pemberdayaan Masyarakat pada bidang ekonomi yaitu pertanian ubi kayu. Dimana daerah Kecamatan Tenayan Raya atau terkenal dengan Daerah Kulim memiliki potensi pertanian ubi kayu yang besar, dengan daerah yang masih terdapat banyak lahan kosong beserta lahan yang sangat memungkinkan untuk bertani ubi kayu. Dikarenakan perkembangan ubi kayu yang dimana perawatan nya tidak begitu sulit serta hasil yang bisa didapatkan oleh Masyarakat sangat memungkinkan untuk menambah penghasilan perekonomian yang tinggi bagi Masyarakat beserta lahan di Daerah Kelurahan Industri Tenayan sendiri yang mendukung. Sehingga program pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kulim atau Kecamatan Tenayan Raya tepatnya pada Kelurahan Indutri Tenayan sangat cocok bila dikembangkan pertanian ubi kayu nya, oleh sebab itu peran Camat begitu besar dalam mengkoordinasikan ke pada Lurah beserta PPL, lalu Lurah dapat mengkoordinasikan kembali kepada para Lembaga Kemasyarakatan, yang diikuti dengan mengkoordinasikan kepada kelompok tani yang terdapat di Kelurahan Indutri Tenayan beserta Masyarakat setempat agar tercapai peningkatan ekonomi yang baik dan menumbuhkan juga rasa kepedulian Masyarakat akan penting pemberdayaan tersebut pada mereka, dimana dapat meningkatkan tingkat perekonomian daerah tersebut yang mana akan mengarah kepada kesejahteraan Masyarakat di Daerah Industri Tenayan.

Tabel I.2 Data Masyarakat Yang Bertani Ubi Kayu Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Wilayah		Jumlah Masyarakat Petani Ubi Kayu
	RW	RT	
1.	01	01	3 orang
		02	4 orang
		03	3 orang
		04	6 orang
2.	02	01	7 orang
		02	8 orang
		03	4 orang
		04	6 orang
		05	2 Orang
Jumlah		09	43 orang

Sumber : Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang ada di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya yang memiliki profesi sebagai Petani ubi kayu, dimana memang kawasan Industri Tenayan yang berpotensi wilayah nya untuk bercocok tanam ubi kayu dari 2 RW yang terdapat di Kelurahan Industri Tenayan ada sekitar 43 keluarga yang profesinya sebagai petani ubi kayu.

Oleh karena itu Camat memiliki tugas yang salah satunya adalah pemberdayaan Masyarakat begitu juga dengan Lurah, dimana Camat sangat berperan aktif dalam memberdayakan Masyarakat terutama di bidang ekonomi, yaitu salah satunya kelompok pertanian ubi kayu. Dalam menjalankan tugas nya Camat berkoordinasi dalam bentuk koordinasi fungsional yaitu penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara Camat dan Lurah diikuti juga dengan PPL, dan dimana Camat dan Lurah dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan memiliki

tugas yang sama dalam memberdayakan Masyarakat. Dengan begitu Camat berkoordinasi kepada Lurah mengikut sertakan juga PPL, dimana Lurah dan PPL akan mengadakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk memberi wawasan kepada Lembaga Kemasyarakatan, dimana yang dapat menambah pengetahuan mereka, sehingga lebih baik dalam menjalankan program pertanian dan dapat mencapai pendapatan materi yang besar dan mensejahterakan para kelompok tani.

Maka perlu mendapat dukungan juga dari berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah maupun Masyarakat. Camat harus mampu mengkoordinasikan satuan kerja dari berbagai pihak terkait, serta segala potensi yang ada demi keberhasilan kegiatan pemberdayaan Masyarakat tersebut. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi pendorong bagi kelancaran pembangunan di bidang mental spiritual Masyarakat dan juga pada pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh sebab itu, Camat sebagai pimpinan pada Kecamatan semestisnya dapat melakukan koordinasi secara maksimal dengan berbagai pihak, baik koordinasi secara fungsional maupun vertikal demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Salah satu bentuk koordinasi yang penting yang dilakukan oleh Camat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Daerah nya adalah Kooordinasi dengan Lurah di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

B. Fenomena

Karena dimana fenomena yang ada bahwasanya koordinasi yang dilakukan dalam pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, dimana masih terdapat beberapa gejala dengan fenomena sebagai berikut:

1. Koordinasi yang di lakukan oleh Camat,terkait dalam kerjasama antara Camat Lurah dengan PPL kurang maksimal dimana koordinasi yang diberikan oleh Camat tidak begitu efektif karena dari fenomena di lapangan kehadiran Camat di setiap pertemuan yang jarang hadir hanya beberapa kali mengkoordinasikan Lurah mengenai pemberdayaan Masyarakat ,akibat pekerjaan Camat yang begitu banyak, sehingga kurang dalam pengawasan terhadap program pemberdayaan Masyarakat yang salah satu nya adalah tugas dari Camat.
2. Lalu koordinasi dari Camat juga belum maksimal dimana Camat kurang aktif dalam pengawasan nya di ikuti juga dengan pertemuan informal yang jarang dapat dihadiri oleh Camat.
3. Dan dari hal ini terindifikasi dalam bimbingan dan pengarahan yang dilakukan dalam pelaksaannya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pertanian ubi yang berlangsung di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, programnya belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang direncanakan.

Koordinasi Camat dengan Lurah sangat lah penting, karena dengan adanya koordinasi yang baik antara Camat dan Lurah , maka setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?”**

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan hasil pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan dan dapat menjadi refrensi bagi penelitian dibidang Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini semoga menjadi manfaat dan masukan di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Lahirnya Pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam Masyarakat, sehingga Masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan Masyarakat modern yang ditandai meningkatnya kebutuhan, peran Pemerintah kemudian berubah menjadi melayani Masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani Masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2005:13).

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2005:19) bahkan menyatakan bahwa Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas Pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Menurut Sedarmayanti (2011:35), Pemerintahan atau Government adalah Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara Kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pemerintahan menurut C.F.Strong (dalam Pamudji, 2008:23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah Negara) atau Badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu Pemerintah).

Dengan demikian lahirnya Pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu Pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak Masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan Masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam Hamdi, 2007:52) menegaskan bahwa Pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Menurut Syafiie (2007:36) ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan Pusat dan Daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu Pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara Pemerintahan dengan Rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila Rakyat dapat merasa bahwa Pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan Rakyat. Ndraha

(2008:70) mengatakan bahwa Pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan Rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa Pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual alat pemenuhan kebutuhan Masyarakat berbentuk jasa public dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 2005:101) menyebutkan bahwa : tugas Pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur Masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

2. Kebijakan

Menurut Ndraha, (2008:5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintahan adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan public dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintahan. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintahan adalah menyelenggarakan Pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Di dalam menjalankan ke-3 fungsi di atas Pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan Pemerintahan. Dunn (2006:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Ibrahim (2009:60-61) setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Tolak ukur kebijakan yang baik adalah:

- a. Berkeadilan sosial
- b. Partisipasi stakeholder pembangunan secara keseluruhan
- c. Peduli lingkungan
- d. Pelayanan publik yang berkualitas
- e. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara
- f. Analitis etis (jujur, objektif, adaptif)

Kelima tahap pembuatan kebijakan di atas menurut Dunn (dalam Nugroho, 2008:11) dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan masalah b. Peramalan c. Rekomendasi d. Pemantauan e. Penelitian (evaluasi)	• Penyusunan agenda • Formulasi kebijakan • Adopsi kebijakan • Implementasi kebijakan • Penilaian kebijakan

Sumber : Dunn (dalam Nugroho, 2008)

Winter (dalam Nugroho, 2008:83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) proses formulasi kebijakan, (2) perilaku organisasi pelaku implementasi, (3) pelaku birokrat pelaksana tingkat bawah, (4) respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam Masyarakat.

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan/seseorang dalam organisasi (Moenir 2009:25). Kemudian menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008:447) mengatakan implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Mazmanian (dalam Nugroho 2008:440) mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel:

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpanduan hirarkis diantara lembaga pelaksanaan, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- c. Variabel devenden, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Menurut Dunn, (2006:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi daripada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan
- d. Penilaian terhadap fungsi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Selain itu Nugroho, (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai 6 (enam) kriteria utama yaitu:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan

Menurut Syafiie (2007:107) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas Pemerintah. Seperti dikemukakan diatas, teori Good Governance mengharuskan penggunaan atau upaya untuk merancang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga rancang bangun ini saling berkomplementer atau sama lain yang merupakan fokus dari ilmu Administrasi Publik.

3. Analisis

Analisis memiliki berbagai macam pendefinisian. Contohnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia kontemporer karangan Salim Peter dan Yenny Salim (2002), menjabarkan analisis adalah proses adalah pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan,dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan,pencobaan, dan sebagainya).

4. Tugas

Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu

kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para Ahli, yaitu Dale Yoder dan Moekijat (2008:9), tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian dari satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Mangkunegara (2010:27), mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Tjiptono (2009:10), menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para Pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

5. Koordinasi

Koordinasi menurut Ndraha (2003:201) adalah sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Ndraha (2003:289) menjelaskan pentingnya koordiansi (coordination) telah disadari sejak lahirnya

keberadaan dan Budaya Manusia. Dalam perkembangan kemudian koordinasi tidak hanya diuraikan secara fungsi tetapi juga lembaga bahkan perilaku dan teori organisasi.

Mengenai koordinasi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) Pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang berbeda-beda dalam dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan Pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain. Ndraha (2003:293).

Kemudian Handayani (1998:86) menambahkan bahwa koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan dan kelompok-kelompok pelaksana dan pencapaian tujuan bersama.

Menurut Manullang (2008:72) mengemukakan bahwa koordinasi yang baik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Yaitu membahas dan mengadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan mencapai tujuan.
2. Mengangkat Suatu Tim
Panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi.
3. Membuat Buku Pedoman
Yaitu penjelasan tugas dari masing-masing unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Mengadakan Pertemuan Informal Yaitu pertemuan dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

Menurut Bintoro (2006:24), koordinasi adalah sebuah fungsi manajemen yang saling bekerja sama mengatur, menyatukan dan menyelaraskan sebuah kegiatan usaha, sehingga tercapainya kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama. Dalam melaksanakan koordinasi harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya empat prinsip yang diajukan Mary Follet dan beberapa pakar lainnya. Selain itu terdapat tipe, teknis, dan metode yang menunjang terjadinya koordinasi efektif.

Dari sisi administrasi, Siagian (2010:110) menyebutkan bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Karena itu koordinasi merupakan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun dan diikat menjadi suatu kebutuhan yang integrasi dengan cara dan tindakan yang seefisien mungkin.

Menurut Moekijat (2008:6) mendefinisikan koordinasi yaitu pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Menurut Syafiie (2007:42), koordinasi adalah kegiatan menyesuaikan diri dari bagian satu dengan yang lain dan gerakan serta pengerjaan bagian pada saat yang tepat,

sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan beberapa pengertian koordinasi diatas maka dapat dinyatakan bahwa koordinasi adalah sebuah fungsi manajemen yang saling bekerja sama dalam mengatur, menyatukan dan menyelaraskan sebuah kegiatan usaha, sehingga tercapainya kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama.

Untuk mengkoordinasikan tujuan umum harus mengembangkan kesatuan tindakan. Koordinasi dapat mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari beberapa satuan kerja sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Koordinasi yang efektif merupakan tujuan yang harus dicapai oleh administrasi yang baik dan hal ini menjadi tanggung jawab langsung dalam suatu organisasi.

Ndraha (2008:294), secara spesifik perlunya koordinasi dilatar belakangi oleh kenyataan :

- a. Adanya hubungan dependen, kasual, dan berurutan secara obyektif antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain.
- b. Adanya hubungan fungsional obyektif antara unit kerja yang satu dengan unit kerja lain.
- c. Adanya pilihan-pilihan dan skala prioritas antara berbagai kegiatan yang berbeda-beda.
- d. Adanya kepentingan bersama.

- e. Kegiatan yang satu merupakan lanjutan kegiatan yang lain di daerah yang berbeda-beda.
- f. Kegiatan yang satu merupakan bagian kegiatan yang lain.
- g. Adanya kegiatan yang sama pada berbagai unit kerja yang berbeda.
- h. Justru dengan independennya unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain dikawatirkan keberhasilan yang satu dihancurkan oleh keberhasilan yang lain.
- i. Kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang berbeda dilaksanakan di lokasi yang sama.

Menurut Bintoro (2006:25), koordinasi yang dilakukan di semua organisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
- b. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
- c. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
- d. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan
- e. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
- f. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.

Menurut Sudjana (2010:39), bahwa secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis koordinasi sesuai dengan runag linkup dan arah jalurnya sebagai berikut:

- a. Menurut linkupnya terdapat:
 - 1) Koordinasi intern yaitu koordinasi antara pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
 - 2) Koordinasi ektern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- b. Menurut arahnya terdapat:
 - 1) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antara pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hirarkhi yang sama dalam suatu organisasi, dan antara pejabat dan organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
 - 2) Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat, oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.

- 3) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hirarkinya.
- 4) Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatonya mempunyai fungsi tertentu.

Dan sudut pandang politik, lahir berbagai sebutan buat koordinasi, misalnya koordinasi horisontal, vertical, dan diagonal, tetapi dari sudut pandang manajemen, koordinasi diidentifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Menurut Bintoro (2006:26-27), koordinasi terbagi menjadi beberapa tipe atau bentuk, yaitu:

a. Koordinasi Vertikal.

Koordinasi yang dilakukan oleh atasan untuk melakukan kegiatan penyatuan dan pengarahan terhadap kegiatan unit dan kesatuan kerja yang ada dibawahnya. Koordinasi vertical dilakukan agar organisasi bertindak secara harmonis sesuai tujuan dan kebijakan organisasi tersebut. Koordinasi vertical dijamin oleh top manager.

b. Koordinasi Horisontal.

Koordinasi antara berbagai departemen yang berbeda dengan unit lain yang levelnya setingkat atau sama. Misalnya koordinasi antar departemen pemasaran dan departemen produksi.

c. Koordinasi Internal.

Koordinasi antar unit yang berbeda dari suatu organisasi yang berbeda di dalamnya dan dicapai dengan mengintegrasikan tujuan dan kegiatan departemen yang berbeda dari perusahaan.

d. Koordinasi Eksternal.

Koordinasi antara organisasi dengan lingkungan luar yang terdiri dari pemerintahan, masyarakat, pelanggan, investor, pemasok, pesaing, lembaga

penelitian, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan pertandingan yang tepat antara kebijakan dan kegiatan perusahaan dengan dunia luar.

e. Koordinasi Diagonal.

Koordinasi yang dilakukan antara karyawan yang bekerja pada tingkat yang berbeda dengan departemen yang berbeda (lintas sektor).

Menurut Ndraha (2008:295), dari sudut pandang ini, didefinisikan beberapa bentuk koordinasi, seperti:

a. Koordinasi Waktu.

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berjalan berurutan, jika berurutan, bagaimana urutan-urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal dan sebangsanya.

b. Koordinasi Ruang.

Koordinasi ruang dapat juga disebut koordinasi wilayah, koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

c. Koordinasi Interinstitusional.

Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau suatu proyek bersama tertentu.

Koordinasi tidak hanya sekedar menyangkut kesepakatan dalam penyatu paduan kerja bersama yang operasional sifatnya, tetapi juga koordinasi dalam pembuatan kebijakan. Dua hal ini memang tidak serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antar organisasi.

Sedangkan menurut G.R.Terry (dalam Hasibuan, 2004:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menjadikan jumlah dan waktu yang tepat,

dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi G.R.Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
2. Waktu dan tempat dari usaha-usaha ini
3. Pengarahan usaha-usaha ini

Menurut Hasibuan Malayu (2004:86) koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaan diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan .
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur-unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

6.Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. (Suharto, 2006:57)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri

secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama, dan budaya. (Widjaja, 2003:169)

Suharto (2006:58-59) medefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi ehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjak pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalaui perubahan struktur social.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian menurut Suharto (2006:67-68) menjelaskan bahwa pelaksaaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi ebutuhan-kebutuhanya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan tidak seimbang (apa lagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah

terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yaitu :

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan yang bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, kepedulian, tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai consumer untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment, guna meningkatkan nilai manusia (human dignitary), penggunaan (human utilization) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Dubois dan Miley dalam Nugroho (2008:119) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain :

- a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara kerjasama antara klien dan pelaksanaan kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit.
- b. Proses pemberdayaan memandang system klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengan hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
- e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari penjelasan diatas inti dari pemberdayaan masyarakat adalah merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dan pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang lemah. Bukan hanya dalam arti tidak terbatas kemampuan ekonomi tapi juga kemampuan lainnya yang bisa membuat orang lain berdaya seperti dalam politik, budaya, sosial agama dan lainnya. Harus dicatat, kemampuan ini bukan hanya berarti mampu memiliki uang, modal, tapi kekuatan atau mobilitas yang tinggi pun itu kemampuan pemberdayaan diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat local sendiri. Birokrasi pemerintahan tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain.

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan Negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu memiliki kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Sedangkan konsep pemberdayaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat Negara, wakil rakyat, para ahli, politis, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkatkan kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

8. Kecamatan

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 223 ayat (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:

- a. Kecamatan Tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan Tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Lalu pada ayat (2) penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Kemudian dalam pasal 224 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari seorang Camat dalam pasal 225 ayat 1 Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelurahan

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 229 ayat 1 bahwa kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah, pada ayat 2 bahwa Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan pada ayat 3 bahwa lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menegaskan bahwasanya Lurah adalah Pimpinan di tingkat Kelurahan. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 bahwa, kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.

10. Penelitian Sebelumnya

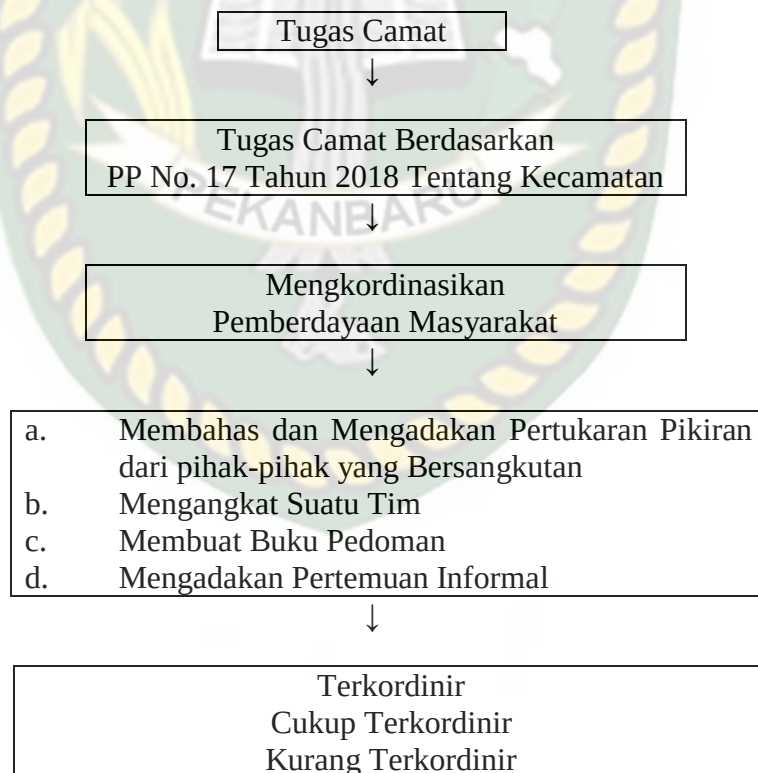
- Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, disusun oleh Aksiza Utami Putri Tahun 2018. Teori kualitatif, dengan masalah bagaimana berjalannya penyelenggaraan tahapan pemberdayaan masyarakat di kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai. Dimana kesamaan dengan bahan peneliti ialah mengenai penyelenggaraan pemberdayaan kelurahan yang ada di Kelurahan yang berbeda.
- Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, disusun Oleh Manggarai Siregar Tahun 2015. Teori Kuantitatif, Dengan

masalah bagaimana Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dimana kesamaan peneliti ialah melihat bagaimana peran aparat pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.

B. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana dapat dilihat dari kerangka pikir berikut:

Gambar II.I Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Hasil Penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

1. Analisis merupakan proses untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu, yang dapat diterapkan pada berbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat mengetahui secara mendetail tentang keadaan lingkungan saat ini.
2. Koordinasi sebagai proses dimana Pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian usaha efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena menciptakan kelebihan usaha yang di koordinasikan pada sejumlah usaha individu dari para peserta.
3. Membahas dan mengadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiringan dan bergandengan mencapai tujuan. Mengadakan pertemuan resmi adalah mengadakan pertemuan musyawarah antara Camat dengan pihak dan PPL untuk membahas mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang di dalamnya

membahas mengenai beberapa masalah yang diadakan pertukaran pikiran yang melibatkan unsur yang terkait yaitu Lembaga Kemasyarakatan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Mengangkat suatu tim :Mengangkat suatu tim adalah membentuk suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas untuk menjalankan segala program kegiatan-kegiatan yang dibentuk yang telah di koordinasikan dan terjun langsung di lapangan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Untuk mengangkat suatu tim perlu koordinasi dalam tahapan atau persiapan sebelum dilakukan musyawarah, kemudian menganalisis berbagai masalah.
5. Membuat buku pedoman : penjelasan terhadap tugas dari masing-masing unit yang bisa dipedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas nya agar berjalan dengan terstruktur, selain itu buku pedoman juga berguna memberikan penjelasan bagi masing-masing unit untuk dapatdipedomani dalam menjalankan atau melaksanakan tugas Camat dalam Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
6. Mengadakan pertemuan informal : pertemuan dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.Pertemuan informal adalah pertemuan antara pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait,dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan dalam rangka pemberian bimbingan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang belum disepakati dapat segera di implementasikan.

7. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala camat di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 224 ayat (1) disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah (2) bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lurah adalah pimpinan di tingkat Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kedudukan Kelurahan dan tugas Lurah dalam Pasal 25 menjelaskan : (1) kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. (2) selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (sufian 2004:105).

Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala/ ukuran
1	2	3	4	5
Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya), sampai terbukti kebenaran melalui beberapa kepasti	Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat	1.Membahas dan mengadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak bersangkutan	a. Mengadakan rapat atau musyawarah b. Yang dihadapi adalah pihak-pihak terkait c. Adanya pembahasan pemberdayaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2.Mengangkat suatu tim	a. Membentuk tim untuk bertugas b. Tim punya tupoksi yang jelas c. Anggota team setuju menjadi team	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3.Membuat buku pedoman	a. Menyiapkan buku pedoman kerja b. Membuat SK yang menjelaskan pedoman kerja c. Buku pedoman	Baik Cukup Baik Kurang Baik

an (penga matan, Pencob aan dan lainnya) (Peter Salim dan Yenni Salim, 2002)		4.Mengadakan pertemuan informal	dan SK tugas dapat di pahami a. Camat mengecek kegiatan masyarakat b. Camat berdialog dengan anggota team di lapangan c. Camat mendatangi kegiatan pemberdayaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
---	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------

Sumber : Modifikasi penulis, 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Analisis Pelayanan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran berikut :

1. Pertemuan Resmi

Baik : Apabila ke 2 item penilaian mengadakan pertemuan resmi dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Apabila salah satu dari item penilaian mengadakan pertemuan resmi dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%.

2. Mengangkat suatu tim

Baik : Apabila ke 2 item penilaian mengangkat suatu tim dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Apabila salah satu dari item penilaian mengangkat suatu tim dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33% .

3. Membuat buku pedoman

Baik : Apabila ke 2 item penilaian membuat buku pedoman dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Apabila salah satu dari item penilaian membuat buku pedoman dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%.

4. Mengadakan pertemuan informal

Baik : Apabila ke 2 item penilaian mengadakan pertemuan informal dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik :Apabila salah satu dari item penilaian mengadakan pertemuan informal dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Di dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam tipe survey deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuisioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005:3).

B. Lokasi Penelitian

Ditetapkannya Kelurahan Industri Tenayan sebagai objek penelitian, karena disamping Daerah Industri Tenayan juga Kelurahan yang daerahnya berpotensi di bidang pertanian khususnya di bidang pertanian ubi kayu. Kemajuan di bidang pertanian terutama ubi kayu yang tak terlepas dari pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1 :Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

No.	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Nama Responden
1	2	3	4	5	6
1.	PPL	1	1	100%	Parjo Setiawan
2.	Camat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	1	1	100%	Abdimas Syafitrah S.IP.,M.Si.
3.	Lurah Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	1	1	100%	M.S. Chandra.W.,SH.
4.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru a. Pengurus LPMK	7	5	71%	Anita Pertiwi Minarni Marsini Dahlius Elidawati

b. Ketua Kelompok Tani ubi kayu	5	5	100%	Mizan Irwan Juliato Horas tukir F.Marpaung Samuel
c. Ketua RT	9	9	100%	Arjuman Slamet Sutris Priyanto Sunnyanto Siti Aisyah Nasrun Sokhiatulo laia Antoni Amir
d. Ketua RW	2	2	100%	Arozi, S.Hi. (RW.01) Drs. H. Kalayo Hasibuan, M.Ed Tesol.(RW.02)
Jumlah	26	24	92%	

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Hadi (2008:71) menyatakan bahwa: masalah tentang berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk penyelidikan kerap kali merupakan soal yang gawat. Umumnya orang hanya menetapkan besar kecilnya sampel atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis seperti biaya, kesempatan dan tenaga. Oleh karena itu teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk Camat di Kelurahan Indutri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru digunakan. Purposive Sampling yaitu : salah satu teknik sampling non random sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dari Tabel III. I, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dari 1 orang PPL, 1 orang Camat, 1 orang Lurah dan 21 anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dari 26 populasi yang ada, yang menjadi sampel berjumlah 24 Orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis membagi kedalam dua bagian:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan strategi Camat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu, misalnya mengenai Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap datanya penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan:

a. Kuisioner

Salah satu cara untuk pengumpulan data dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun penulis memakai kusioner sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data karena dengan membagikan lembaran kusioner kepada para responden sehingga penulis dapat langsung melihat apa jawaban dari pilihan kategori yang di pilih oleh para respnden.

b. Observasi

Teknik ini terlebih dimulai dengan melakukan tinjauan data lapangan ke lokasi penelitian kemudian menyusun dan membuat daftar pertanyaan untuk responden berdasarkan temuan pertama. Setelah itu peneliti mengadakan wawancara langsung kepada responden terpilih. Karena data yang akan

diperoleh lebih akurat bila penulis langsung melakukan observasi ke lapangan agar data maupun wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden lebih akurat hasilnya.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu Kepala Camat Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru. Karena dengan cara bertanya langsung kepada para responden memungkinkan bagi penulis dapat menerima info data yang jelas sesuai dengan hasil dari jawaban langsung oleh responden setelah diajukan berbagai pertanyaan yang diperlukan untuk pengumpulan data bagi penulis.

d. Dokumentasi

Sebuah pengumpulan data dengan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, foto, Undang-Undang dan lain-lain. Alasan penulis memakai dokumentasi Karena dokumentasi juga dapat menguatkan bagi penulis akan keabsahan data yang diperoleh, sehingga para pembaca dapat melihat bahwasannya penulis memang benar melakukan sebuah penelitian secara langsung kepada para

sumber yang dijadikan responden dan memnag benar terjun langsung ke lapangan untuk pengecekan atau penelitian secara langsung dengan menampilkan misalnya beberapa foto sebagai dokumentasinya.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh , maka data tersebut di kelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan di analisis dalam dua bentuk. Data yang bersifat kuantitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang kuantitatif akan ditabulasi dalam bentuk tabel, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018/2019 Bulan/Minggu															
		Februari				Maret				April				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X								
2.	Seminar UP									X							
3.	Revisi UP									X							
4.	Revisi Kuesioner										X						
5.	Rekomendasi Survey													X			
6.	Survey Lapangan														X		
7.	Analisis Data														X		
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)															X	
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																X
10.	Ujian Konfrehensif Skripsi															X	
11.	Revisi Skripsi																X
12.	Penggadaan Skripsi																X

Sumber : Modifikasi Penelitian

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Tenayan Raya adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan ini membentang sepanjang jalan Lintas Timur sampai ke Teluk Lembu Ujung (Teleju) dengan luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km². Batas-batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah:

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan sungai Siak.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan sungai Siak.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

B. Pemerintahan

Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan, 129 RW dan 462 RT. Pada setiap Kelurahan di pimpin oleh seorang Lurah, dalam melakukan tugas nya Lurah dibantu oleh beberapa Staf dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan Pemerintahan. Kelurahan Industri Tenayan memiliki 2 RW dan 9 RT.

C. Penduduk

Masalah Penduduk di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya sama halnya seperti Daerah lainnya. Untuk mencapai suatu Manusia yang berkualitas dengan jumlah Penduduk yang kurang terkendali cukup sulit terwujud. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi Bayi, dan perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran Penduduk yang seimbang serta potensi Penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya pada Tahun 2017 berjumlah 2.553 Jiwa, yang terdiri dari 1.285 Jiwa Penduduk Laki-Laki dan 1.268 Jiwa Penduduk Perempuan.

D. Sosial

1. Pendidikan

Keberhasilan suatu pembangunan di Daerah dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh sumber daya Manusia yang ada di dalamnya, semakin maju pendidikan akan dapat meningkatkan sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Daerah tersebut. Demikian pentingnya peran pendidikan, maka oleh karena itu sudah sewajarnya Pemerintah membuat perhatian yang lebih lagi terhadap dunia pendidikan.

2. Pertanian dan Perkebunan

Tanam pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. jenis tanaman pangan dan perkebunan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya yaitu ubi kayu, papaya, pisang, manga, durian, cabai, dimana potensi besar ubi kayu beradadi Kelurahan Indutri Tenayan.

Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman yang sangat potensial di Daerah Indutri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya adalah perkebunan sawit.

3. Peternakan

Pembangunan sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan pruduksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi Masyarakat disamping meningkatkan pendapatan peternakan. Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya terdapat ternak sapi, kerbau, kambing, dan babi. Jumlah ternak pada Tahun 2017 Sapi 2.270 ekor, Kerbau 223 ekor, Kambing 1.174 ekor, dan Babi 1.221 ekor.

4. Industri

Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya sendiri memiliki banyak industri micro/kecil sekitar 861, dengan industry sedang 3, dan industry besar 2, dengan jumlah industri yang ada 866 industri. Dan untuk Kelurahan Industri Tenayan rencana nya akan dibangun beberapa indutri yang akan beroperasi di Daerah tersebut.

E. Sejarah lokasi Penelitian

Kecamatn Tenayan Raya merupakan dulunya pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya. Memiliki luas Wilayah sekitar 171,27km², yang terdiri dari 116 RW dan 440 RT, dengan jumlah Penduduk sekitar 163.610 Jiwa.

Daerah Tenayan Raya menurut rencana akan dijadikan daerah kawasan industri, saat ini sedang dilakukan eksplorasi gas alam yang digunakan untuk bahanbakar pembangkit listrik. Selain itu Tenayan Raya juga merupakan daerah industri batu bata yang dikelola oleh Masyarakat setempat, lokasi ini banyak terdapat salah satunya di Kelurahan Industri Tenayan. Selain batu bata Kecamatan Tenayan Raya juga terkenal akan hasil dari pertanian ubI kayu yang diberi pupuk sampah rumah tangga.

Sejak Tahun 2017, banyak Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya yang mengalami pemekaran, yakni :

1. Kelurahan Kulim dimekarkan menjadi : Kelurahan Pembatuan, Kelurahan Sialang Rampai, Kelurahan Sialang Sakti.
2. Kelurahan Sail dimekarkan menjadi : Kelurahan Industri Tenayan, Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Melebung, Kelurahan Mentangor.
3. Kelurahan Rejosari dimekarkan menjadi : Kelurahan Bambu Kuning.
4. Kelurahan Tangkerang Timur dimekarkan menjadi : Kelurahan Pematang Kapau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penulisan karangan ilmiah perlu dikemukakan identitas yang menjadi responden penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, agar data yang diperoleh benar-benar yang diperlukan oleh seorang peneliti dan juga dapat di pertanggung jawabkan.

1. Jenis Kelamin

Mengenai jenis kelamin responden dinilai perlu untuk dijelaskan secara rinci agar mengetahui berapa jumlah responden yang berjenis kelamin Laki-Laki dan Perempuan. Untuk mengetahui data mengenai jenis kelamin responden mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 :Distribusi Responden Penelitian Menurut Jenis Kelamin penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	19	80%
2.	Perempuan	5	20%
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru bila dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 19 Orang atau sama dengan 80% dan Wanita sebanyak 5 Orang atau sama dengan 20%. Maka dari tabel diatas jenis kelamin Laki-Laki paling banyak mendominasi jumlahnya dari Perempuan.

2. Tingkat Umur Responden

Selain jenis kelamin, Umur juga suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam pekerjaan, dimana semakin lama Seseorang bekerja, maka semakin banyak informasi, ilmu dan pengalaman yang di peroleh. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat umur responden penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri

Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.2 :Distribusi Tingkat Umur Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30	2	8%
2.	31-40	5	20%
3.	41-50	13	52%
4.	51-60	4	20%
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Usia responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mrngkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berkisar 20-30 berjumlah 2 Orang atau sama dengan 8%, kemudian usia 31-40 berjumlah 5 Orang atau sama dengan 20%, rentang usia 41-50 berjumlah 13 Orang atau sama dengan 52% dan rentang usia 51-60 berjumlah 4 Orang atau sama dengan 20%. Maka dapat dilihat dari tabel diatas bahwa responden terbanyak adalah yang rentang usianya 41-50 tahun.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam bekerja, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu dalam penelitian perlu ditentukan pendidikan responden, karena merupakan langkah awal yang harus dipenuhi dalam sebuah karangan ilmiah maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 :Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	SD	2	8%
2.	SMP	1	4%
3.	SMA/SMK	14	56%
4.	DIPLOMA	1	4%
5.	S1	4	20%
6.	S2	2	8%
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari data tabel diatas bahwa diketahui tingkat pendidikan responden penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan SD terdapat 2 dengan persentase 8% Orang, selanjutnya SMP terdapat 1 Orang dengan persentase 4%, SMA terdapat 14 Orang dengan persentase 56%, DIPLOMA terdapat 1 Orang dengan persentase 4%, S1 terdapat 4 Orang dengan persentase 20% dan tingkat pendidikan S2 terdapat 2 Orang dengan persentase 8%.

B. Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas ataupun kemampuan Aparat Pemerintah setempat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa Kelurahan adalah unit terkecil dalam tata Pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan Masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan Aparat Pemerintah khususnya Camat Kecamatan Tenayan Raya bisa lebih meningkatkan lagi tugas pelayanan terhadap Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya terkhusus Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Pembentukan Tugas Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam pasal 10 PP No.17 Tahun 2018 dijelaskan Camat mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota;

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sesuai di atas menjelaskan tugas Camat salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tugas nya, maka Camat mempunyai tugas yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat juga dilihat bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru di lihat dari indikator di bawah ini :

a. Mengadakan Pertemuan Resmi

Mengadakan pertemuan resmi adalah mengadakan pertemuan musyawarah antara Camat dengan pihak Kelurahan dan PPL untuk membahas mengenai pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru khususnya petani ubi kayu.

Dalam rangka pertemuan tersebut Camat beserta pihak Kelurahan, LPM, kelompok tani dan PPL dapat dilihat respon atau tanggapan dari mereka seperti data pada Tabel berikut ini :

Tabel.V.4 :Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Mengadakan rapat atau musyawarah	5	17	2	24
2.	Yang dihadapi adalah pihak-pihak terkait	2	14	8	24
3.	Adanya pembahasan pemberdayaan	5	16	3	24
Jumlah		12	47	13	72
Rata-rata		4	16	4	24
Persentase		16%	67%	17%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari Tabel. V.5. diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden tentang pertemuan resmi atau rapat koordinasi dengan berbagai Instansi dan pihak petani,

untuk kategori Baik ada sebanyak 4 Orang responden atau sama dengan 16%. Artinya responden sebanyak 4 Orang ini menilai bahwa pertemuan resmi mengenai musyawarah tentang koordinasi dengan Lurah, PPL dan LPM, beserta kelompok tani berjalan Baik.

Sementara itu sebanyak 16 Orang responden atau sama dengan 67%, menyatakan pertemuan resmi atau rapat terkategori Cukup Baik. Artinya responden ini menilai pertemuan resmi koordinasi Camat beserta Lurah, PPL, dan LPM, kelompok tani Cukup Baik.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya Camat Mengadakan Pertemuan Resmi, untuk kategori Kurang Baik berjumlah 4 Orang atau sama dengan 17%. Artinya responden ini menilai pertemuan resmi atau rapat koordinasi Camat berserta Lurah, PL, LPM dan petani ubi kayudalam kategori Kurang Baik.

Dari Tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Lurah, PPL, beserta LPM dan kelompok tani mengenai koordinasi Camat pada mereka tentang indikator Pertemuan Resmi dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 67%, dari jumlah responden 24 orang. Cukup Baik ini menurut mereka karena Camat ada melakukan pertemuan resmi atau rapat serta membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat namun lebih memfokuskan pada bidang infrastrukturnya serta Camat sendiri juga jarang dapat hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Hasil Observasi yang penulis lakukan langsung di lapangan ditemukan bahwa masih kurang berjalannya Program pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi terkhusus pada pertaniannya karena Camat sendiri lebih terfokus ke segi pembangunan infrastrukturnya dan juga kehadiran Camat yang kurang dalam setiap pertemuan resmi yang dilakukan sehingga di sini Lurah lebih banyak berperan. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Kecamatan Tenayan Raya, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“sebagaimana telah dijelaskan kita telah melakukan kegiatan pemberdayaan di mana yang sekarang menjadi focus ialah pembangunan infrastruktur di Kelurahan ini, karena dari Masyarakat sendiri meminta agar dilaksanakan perbaikan-perbaikan untuk jalan-jalan yang belum diaspal atau semenisasi dan yang sudah rusak, namun untuk pertemuan dengan lurah berserta Masyarakat kini sudah semakin jarang, tetapi tetap kita usahakan diadakan musrembang yang terus rutin dilaksanakan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pertemuan resmi yang diprakarsai dan dilaksanakan di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya sudah jarang dilakukan, terlihat dari pertemuan rutin yang dilakukan lebih sering membahas mengenai infrastruktur yang di bawa dalam forum musrembang, begitu juga dengan kehadiran Camat yang kurang aktif dalam setiap pertemuan dikarenakan Camat sendiri memiliki banyak kesibukan di luar sehingga tidak bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Selain itu, yang penulis amati forum musyawarah yang ada di Kelurahan lebih banyak dilakukan dan diinisiatifkan oleh Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Industri Tenayan. Dari hasil kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan

pertemuan resmi yang di lakukan oleh Camat untuk pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan berada dalam kategori Cukup Baik.

b. Mengangkat Suatu Tim

Mengangkat suatu tim adalah membentuk suatu tim salah satunya adalah kelompok tani yang dilakukan oleh Camat dalam melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di bidang pertanian ubi kayu. Untuk mengangkat suatu tim perlu koordinasi dalam tahapan atau persiapan sebelum dilakukan musyawarah, kemudian menganalisis berbagai masalah tersebut. Dalam rangka mengangkat suatu tim untuk pihak Kelurahan, PPL, LPM dan kelompok petani dapat dilihat jawaban dan respon mereka yang dilihat dari data tabel berikut:

Tabel.V.5 :Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Membentuk tim untuk bertugas	4	16	4	24
2.	Tim punya tupoksi yang jelas	5	12	7	24
3.	Anggota tim setuju menjadi tim	3	13	8	24
Jumlah		12	41	19	72
Rata-rata		4	13	7	24
Persentase		17%	54%	29%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari Tabel. V.5. diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden tentang Mengangkat Suatu Tim dari berbagai Instansi dan pihak petani, untuk kategori Baik ada sebanyak 4 Orang responden atau sama dengan 17%. Artinya responden yang 4 Orang ini menilai Mengangkat Suatu Tim yang dilakukan oleh Camat dalam mengangkat kelompok tani berjalan Baik.

Sementara itu sebanyak 13 orang responden atau sama dengan 54% menyatakan Mengangkat Suatu Tim terkategori Cukup Baik. Artinya responden ini menilai Mengangkat Suatu Tim yang dilakukan oleh Camat beserta Lurah, PPL, LPM, dalam membentuk kelompok tani berada pada kategori yang Cukup Baik.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya Camat Mengangkat Suatu Tim untuk kategori Kurang Baik berjumlah 7 Orang atau sama dengan 29%. Artinya responden ini menilai Mengangkat Suatu Tim yang dilakukan oleh Camat berserta Lurah,PLL, LPM dan kelompok tani dalam kategoti Kurang Baik.

Dari Tabel. V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Mengangkat Suatu Tim dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 54% dari jumlah 24 orang responden.

Berdasarkan Hasil Observasi yang secara langsung penulis lakukan di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selama ini tim sudah ada dibentuk, dimana tim tersebut anggota Lembaga Kemasyarakatan salah satunya

kelompok tani dari pemberdayaan bidang ekonomi yang berjumlah 5 kelompok, hal ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Camat, dimana beliau menjelaskan:

“selama ini kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan bekerjasama dengan Lurah, PPL dimana berperan untuk memberi wawasan kepada Masyarakat kelompok tani tentang bercocok tanam, beserta kelompok tani yang dibentuk dari anggota Lembaga Kemasyarakatan, hal ini pun tidak lepas dari peran mereka sebagai sebuah Lembaga yang bermitra dengan Kelurahan dalam memberdayakan Masyarakat yang tujuannya untuk mensejahterakan dan memajukan Kelurahan Industri Tenayan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Tenayan Raya yang terlihat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Camat selama ini diperani juga oleh Lurah, PPL dan Lembaga Kemasyarakatan, Seperti pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh tim kelompok tani yang telah dibentuk, namun kelompok tani belum mendapat tugas pokok yang terstruktur jelas dari Camat sehingga hasil dari kinerja kelompok tani belum maksimal ditambah lagi dengan wawasan yang masih kurang untuk langsung terjun ke lapangan melaksanakan kegiatan yang telah diberi. Dari hasil kusioner, data hasil wawancara dan data hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa mengangkat suatu tim yang dilakukan oleh Camat untuk pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan berada pada kategori Cukup Baik.

c. Membuat Buku Pedoman

Buku Pedoman adalah guna memberikan penjelasan dari masing-masing unit untuk di pedomani dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat, dimana buku pedoman juga bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan.

Dalam rangka Membuat Buku Pedoman oleh Camat maka respon dari pada Lurah, PPL, LPM dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. V.6 :Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyiapkan buku pedoman	5	17	2	24
2.	Membuat SK yang menjelaskan Pedoman kerja	7	14	3	24
3.	Buku pedoman dan SK tugas dapat dipahami	3	15	6	24
Jumlah		15	46	11	72
Rata-rata		5	15	4	24
persentase		21%	62%	17%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari Tabel. V.6. diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden tentang indikator Membuat Buku Pedoman dari pihak Instansi dan pihak kelompok tani untuk kategori Baik sebanyak 5 Orang atau sama dengan 21%. Artinya responden yang 5 Orang ini menilai Membuat Buku Pedoman terkategori Cukup Baik.

Kemudian untuk responden yang menanggapi, terhadap indikator Membuat Buku Pedoman untuk Kategori Cukup Baik berjumlah 15 Orang responden atau sama dengan 62%. Artinya ke 15 Orang responden ini menilai indikator Membuat Buku Pedoman masuk dalam kategori Cukup Baik.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya camat Membuat Buku Pedoman, untuk kategori Kurang Baik adalah berjumlah 4 Orang atau sama dengan 17%. Artinya 4 Orang responden ini menilai indikator Membuat Buku Pedoman oleh Camat terkategori Kurang Baik.

Dari Tabel V.6. diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Membuat Buku Pedoman dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 62% dari jumlah responden 24 Orang.

Berdasarkan Hasil Observasi yang penulis lakukan di lapangan ditemukan bahwa selama ini dalam melakukan kegiatan pemberdayaan Masyarakat seperti pemberdayaan pertanian ubi kayu serta pemberdayaan lainnya, mendapat surat keterangan dari Camat yang memuat pelaksanaan dari kegiatan tersebut, hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Kecamatan Tenayan Raya, dimana Beliau menyampaikan bahwa :

“surat keterangan sudah kita buat setiap melakukan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, hal ini juga untuk menetapkan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan

tersebut, untuk buku pedoman sendiri secara khusus kita memang belum mempunyainya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat kegiatannya sudah dilengkapi dengan SK guna penentu pelaksana kegiatan tersebut, namun utk buku pedoman secara khusus memang belum ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengikuti koordinasi Camat yang berlandaskan tugas pokok sesuai fungsinya. Dari hasil kusioner, data hasil wawancara, data hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa membuat buku pedoman yang dilakukan oleh Camat untuk pemberdayaan di Kelurahan Industri Tenayan berada pada kategori Cukup Baik.

d. Mengadakan Pertemuan Informal

Pertemuan informal adalah pertemuan antara Pemerintahan Daerah dan pihak-pihak terkait, terutama Camat bersama Lurah, PPL beserta Lembaga Kemasyarakatan dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan dalam rangka pemberian bimbingan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang belum disepakati dapat segera di implementasikan.

Dalam rangka Mengadakan Pertemuan Informal oleh Camat serta pihak Kelurahan, PPL, LPM dan kelompok tani dapat dilihat tanggapan mereka dari tabel berikut :

Tabel. V.7 :Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Lurah bisa mendatangi kegiatan pemberdayaan	8	14	2	24
2.	Lurah mengecek kegiatan masyarakat	9	10	5	24
3.	Lurah berdialog dengan anggota tim di lapangan	5	14	5	24
Jumlah		22	38	12	7
Rata-rata		7	13	4	24
Persentase		29%	54%	17%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2019

Dari Tabel. V.7. diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden terhadap indikator Mengadakan Pertemuan Informal, untuk Kategori Baik berjumlah 7 Orang responden atau sama dengan 29%. Artinya responden yang 7 Orang ini menilai Mengadakan Pertemuan Informal oleh Camat terhadap Lurah, PPL, LPM dan kelompok tani berada dalam kategori Baik.

Kemudian untuk responden yang menanggapi terhadap indikator Mengadakan Pertemuan Informal untuk kategori Cukup Baik berjumlah 13 Orang responden atau sama dengan 54%. Dimana artinya pihak responden dalam indikator Mengadakan Pertemuan Informal mengkategorikan Cukup Baik.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya Camat Mengadakan Pertemuan Informal, untuk kategori Kurang Baik berjumlah 4 Orang atau sama dengan 17%.

17%. Artinya ke 4 Orang responden ini menilai Mengadakan Pertemuan Informal masuk dalam kategori Kurang Baik.

Dari Tabel. V.7. diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Mengadakan Pertemuan Informal dari tiga pertanyaan yang penulis ajukan berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 54% dari jumlah responden 24 Orang.

Berdasarkan Hasil Observasi yang penulis lakukan langsung di lapangan dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan yang langsung dilakukan oleh anggota Lembaga Kemasyarakatan yaitu salah satunya kelompok tani, tampak Camat juga turut berpartisipasi baik untuk mengecek pelaksanaan kegiatan tersebut, maupun terlibat langsung dalam kegiatan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Camat dalam wawancara berikut :

“sebagaimana telah disampaikan, kita tentu berusaha untuk aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang telah kita laksanakan, dengan terus berupaya untuk mengawasi kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara baik dan tepat waktu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa selama ini dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, Camat Kecamatan Tenayan Raya ikut serta dalam kegiatan tersebut walaupun hanya sekedar mengecek atau memeriksa keberlangsungan kegiatan pemberdayaan tersebut, Namun untuk berdialog kepada tim di lapangan masih kurang aktif , karena Camat hanya melihat kondisi di lapangan saja tanpa berdiskusi atau berbincang langsung dengan para anggota kelompok tani yang ada di lapangan. Dari hasil kuesioner, hasil wawancara dan data hasil observasi,

maka dapat di simpulkan bahwa mengadakan Pertemuan Informal yang di lakukan oleh Camat untuk pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan berada pada kategori Cukup Baik.

Kemudian selanjutnya untuk menganalisis pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dari analisis yang telah dijelaskan dari beberapa indikator, maka dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan responden sebagai berikut:

Tabel. V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Mengadakan pertemuan resmi	4	16	4	24
2.	Mengangkat suatu tim	4	13	7	24
3.	Membuat buku pedoman	5	15	4	24
4.	Mengadakan pertemuan informal	7	13	4	24
Jumlah		20	57	19	96
Rata-rata		5	15	4	24
Persentase		21%	62%	17%	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019

Dengan melihat hasil rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dikategorikan **Cukup Baik dengan persentase 62%**. Fakta ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yang mengatakan Baik rata-rata 5 Orang atau sekitar 21%, lalu untuk kategori Cukup Baik rata-rata 15 Orang atau sekitar 62%, dan untuk kategori Kurang Baik rata-rata 4 Orang atau sekitar 17% dari keseluruhan jumlah responden.

C. Hambatan Mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

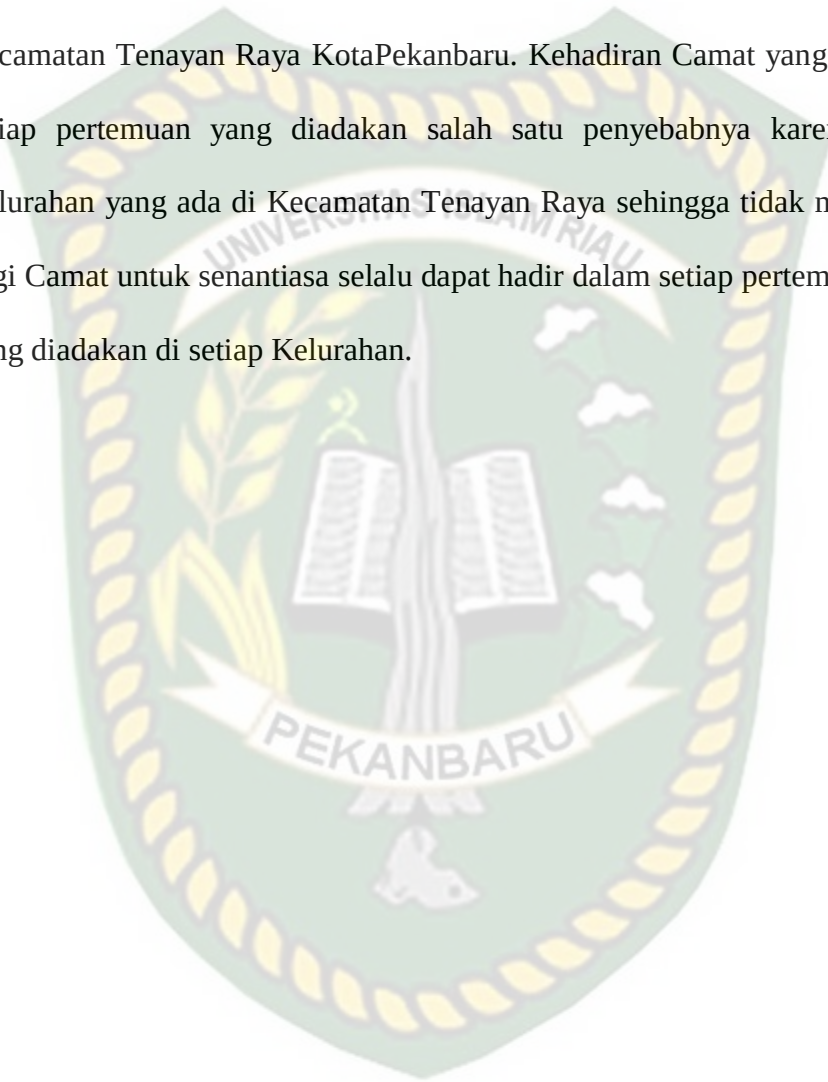
Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, pelaksanaan tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat memiliki beberapa hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Keberadaan pertemuan resmi yang dilakukan Camat dengan Lurah, PPL beserta anggota Lembaga Kemasyarakatan selama ini belum ada secara spesifik atau secara khusus membahas mengenai pemberdayaan di bidang ekonomi khususnya di pertanian, melainkan lebih memfokuskan ke bidang infrastruktur yang ada di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya yang dibahas di dalam forum musrembang saja. Karena dari Masyarakat sendiri juga mendukung agar

infrastruktur untuk Kelurahan Industri Tenayan lebih di prioritaskan terutama pembangunan dan perbaikan jalan rusak.

2. Keberadaan tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang bersal dari anggota Lembaga Kemasyarakatan belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara independen yang artinya belum mampu untuk dapat bergerak sendiri, karena dimana dapat dilihat selama kegiatan pemberdayaan seperti pelaksanaan pertanian ubi kayu para kelompok tani masih kurang dalam wawasan untuk bisa langsung terjun di lapangan karena belum ada secara jelas tugas dari tim yang sudah dibentuk, tim hanya dituntun untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik saja tanpa ada landasan pokok yang terstruktur bagi tim tersebut.
3. Tidak adanya petunjuk pembuatan buku pedoman yang telah terstruktur dari Pemerintah Kota yang menyebabkan Camat masih belum bisa membuat buku pedoman guna pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat, yang selama ini dilakukan hanya berupa surat-surat keterangan atau SK saja yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
4. Intensitas kehadiran Camat dalam pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan, yang menyebabkan kurangnya peran Camat dalam setiap hasil dari musrembang akibat Camat yang jarang ambil bagian di setiap kegiatan tersebut, seperti pertemuan yang dilakukan Lurah PPL, berserta Lembaga Kemasyarakatan untuk membahas mengenai kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan lainnya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran Camat untuk mau melakukan

atau membuat pertemuan tidak resmi yang membahas masalah pemberdayaan tersebut, peran ini lah yang selama ini digantikan oleh Lurah yang lebih berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya KotaPekanbaru. Kehadiran Camat yang kurang dalam setiap pertemuan yang diadakan salah satu penyebabnya karena banyaknya Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya sehingga tidak memungkinkan bagi Camat untuk senantiasa selalu dapat hadir dalam setiap pertemuan atau acara yang diadakan di setiap Kelurahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, telah dapat dilihat bagaimana pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta saran untuk menjadikan karya tulis ini menjadi lebih baik lagi.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berada dalam kategori **“Cukup Baik”** , dimana meskipun terlihat adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Kelurahan Industri Tenayan seperti pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu pertanian ubi kayu nya dan yang lainnya di bidang infrastruktur dan bidang sosial, akan tetapi masih belum terlaksana secara optimal, dimana keberadaan Camat sebagai pelaksana tugas kegiatan pemberdayaan Masyarakat kurang aktif dalam pertemuan-pertemuan

yang diadakan sehingga peran Camat sangat kurang bila dibandingkan dengan Lurah yang lebih banyak berkontribusi menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat beserta anggota Lembaga Kemasyarakatan.

- b. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana hambatan tersebut ialah:
 - a. Pertemuan resmi yang dilakukan Camat dengan Lurah, PPL beserta Anggota Lembaga Kemasyarakatan belum ada secara spesifik atau secara khusus membahas mengenai pemberdayaan khususnya di pertanian, melainkan lebih memfokuskan ke bidang infrastruktur .
 - b. Keberadaan tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang bersal dari Anggota Lembaga Kemasyarakatan belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara independen, karena dilihat selama kegiatan pemberdayaan seperti pelaksanaan pertanian ubi kayu para kelompok tani masih kurang dalam wawasan untuk bisa langsung terjun di lapangan karena belum ada secara jelas tugas dari tim yang sudah dibentuk,
 - c. Tidak adanya petunjuk pembuatan buku pedoman dari Pemerintah Pusat yang terstruktur menyebabkan Camat masih belum bisa membuat buku pedoman guna pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat,
 - d. Intensitas kehadiran Camat dalam pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan, yang menyebabkan kurangnya peran Camat dalam setiap hasil

dari musrembang akibat akibat Camat yang jarang ambil bagian di setiap kegiatan tersebut.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat merancanag buku pedoman kegiatan pemberdayaan Masyarakat agar Camat juga dapat membuat nya untuk tingkat Kelurahan,yang dapat membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam ruang lingkup kerjanya.
- b. Bagi Camat Kecamatan Tenayan Raya kedepannya lagi diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan koordinasi baik dengan perangkatnya, Lurah dan PPL, yang berperan untuk menambah wawasan bagi para kelompok tani, dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan informal yang tentunya dapat dihadiri oleh Camat, jangan hanya kegiatan nya saja yang berjalan tetapi Camat juga harus lebih giat berperan di dalam forum tersebut, yang gunanya untuk dapat lebih lagi meningkatkan dan dapat memajukan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Industri Tenayan sehingga Kelurahan tersebut dapat lebih maju dan maju lagi di setiap bidang pemberdayaannya.

- c. Kepada Lurah Industri Tenayan kiranya dapat mempertahankan kinerja nya yang telah aktif dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan bisa lebih lagi banyak berkontribusi dimana seperti diketahui Lurah juga memiliki tugas yang sama dengan Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat, begitu juga PPL, agar dapat berperan aktif lagi untuk memberikan wawasan-wawasan kepada masyarakat mengenai pertanian yang baik, dan tidak luput juga untuk para anggota lembaga kemasyarakatan agar dapat juga berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan mau untuk ikut mendorong dan mensuport kegiatan-kegiatan yang telah dibentuk oleh Camat beserta Lurah, mau juga memberikan kritik dan saran yang lebih untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan, sehingga Masyarakat juga dapat kemajuan baik dari materi, ilmu, dan pengalaman yang di dapat yang gunanya bisa meningkatkan kesejahteraan bersama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Azwar, Muslimin, 2011. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung, Alumni
- Bintoro, 2006. *Good Governance (Pradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Dunn, N. William. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Jogjakarta, Gajah Mada University Press
- Ermaya, Suradinata, 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Firman Maulana, 2007. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Hadi, Sutrisno, 2008. *Metodologi Research*. Jilid Tiga. Yogyakarta, Andi
- Handayanigrat, Soewarno, 1998. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Hamdi, Rusli, 2007. *Otonomi Daerah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Ibrahim, M. 2009. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Hasibuan Malayu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke Tujuh, edisi revisi, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Moekijat, 2008. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung, Mandar Maju
- Moenir, H. A. S. 2009. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Mangkunegara 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Bandung. Bangun, Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga, Bandung

- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Birokrasi dan Pembangunan : Dominasi atau Alat Demokratisasi*. Jakarta, Gramedia
- Nugroho, D Riant, 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Pamudji, S, 2008. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, M, Ryas, 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Yasif Watampone
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta, Modern English Press
- Sedarmayanti, 2011. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Mandar Maju
- Siagian, Sondang dan Agus Tarsono, 2010. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, PT. Gunung Agung
- Sudarsono, Gunawan, 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Indonesia : (Teori dan Pelaksanaan)*, Bandung, Alqaprint
- Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung
- Sudjana, 2010. *Dasar-Dasar Proses Belajar*. Sinar Baru, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung, Refika Aditama
- Thoha, Mifta, 2005. *Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat : Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta, LP3ES
- Tjiptono, 2009. *Strategi Pemasaran*. Andi Offset, Yogyakarta
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo

Dokumen Lain :

Buku Pedoman Penulisan Akademik UIR Edisi Revisi 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

